



IBEC FEB UI

RANGKUMAN KEUANGAN PUBLIK ISLAM



I-LIB

PSDM IBEC FEB UI

2019

Pertemuan 1

✚ **Ekonomi Publik** :

Ilmu yang mempelajari bagaimana pemerintah melakukan kebijakan ekonomi melalui pendapatan dan pengeluaran pemerintah dan mengalokasikan sumber daya yang ada dengan mempertimbangkan aspek efisiensi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

✚ **Ekonomi Publik Fokus terhadap**

1. Efisiensi alokasi sumber daya
2. Mendistribusikan pendapatan secara merata
3. Menjaga stabilitas perekonomian

✚ **Mengapa perlu mempelajari ekonomi publik?**

Untuk mengoreksi perekonomian agar mencapai ekonomi yang lebih efisien

✚ **Pondasi ekonomi publik** : welfare economics dengan melakukan evaluasi alokasi sumber daya yang optimal yang akan berdampak kesejahteraan masyarakat

✚ **Pertanyaan pada ekonomi publik**

1. Kapan seharusnya pemerintah mengeluarkan intervensi

- a. Saat terjadinya market failures (ketika outcome pada pasar tidak memaksimalkan efisiensi). Market failures berasal dari, asymmetric information, publik goods, eksternalitas (biaya yang harus ditanggung atau manfaat tidak langsung yang diberikan dari suatu pihak akibat aktivitas ekonomi), common property resources (kondisi dimana hak properti atas suatu sumberdaya dipegang secara bersama. Kondisi tersebut menyebabkan terjadinya over-allocation karena hampir semua pihak merasa memiliki hak untuk memanfaatkannya).
- b. Redistribusi Income □ pendistribusian kembali pendapatan masyarakat kelompok kaya kepada kelompok miskin melalui pajak atau pungutan lainnya.

2. Bagaimana intervensi yang dikeluarkan pemerintah.

- a. Melakukan mekanisme harga (bukan harga barang/jasa tapi income yang ada pada masyarakat) melalui pajak (menaikkan harga barang yang diproduksi berlebihan) dan subsidi (menurunkan harga barang yang under produced).
- b. Membatasi (untuk barang yang over produced) atau memerintahkan untuk melakukan pembelian/penjualan (barang yang underproduced).
- c. Menyediakan barang publik : pemerintah menyediakan barang secara langsung, agar berpotensi mencapai tingkat konsumsi yang maksimal guna kesejahteraan masyarakat.
- d. Pembiayaan publik pada barang private : pemerintah dapat membiayai pihak swasta untuk menyediakan tingkat penyediaan barang yang diinginkan.

3. Apa efek intervensi terhadap ekonomi : untuk melihat bagaimana efek dari intervensi pemerintah dibutuhkan bukti empiris melalui data dan model statistic untuk menilai bagaimana masyarakat menanggapi intervensi kebijakan yang dilakukan pemerintah. Selain itu dapat dilihat dari direct effects dan indirect effects (dana desa).

4. Kenapa pemerintah memilih intervensi yang telah dipilih : karena pemerintah sulit untuk menyatukan preferensi masyarakat secara aggregate untuk dijadikan kebijakannya, maka pemerintah menentukan kebijakannya dengan melihat dampak negative yang paling kecil.

✚ **Legal framework Indonesia** : negara desentralisasi (pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota)

✚ **General Equilibrium** : Exchange Economy (indifference curve), pareto efficient, pareto improvement
Asumsi : terdiri dari 2 pelaku, 2 komoditi, tidak ada proses produksi, 2 pelaku berinteraksi dengan melakukan pertukaran

✚ **First Fundamental Theorem of Welfare Economics**

Asumsinya: semua produsen dan konsumen bertindak sebagai perfect competitors tidak ada yang memiliki market power. Sehingga terdapat pareto efficient yang berimplikasi alokasi resources akan efisien tanpa adanya central planning dan tidak adanya intervensi pemerintah.

✚ **Second fundamental theorem of welfare economics**

Setiap alokasi pada pareto efisien akan dicapai oleh competitive market dengan redistribusi dana yang benar, masalah efisiensi dan keadilan distribusi dapat dipisahkan.

✚ **Efficiency vs equity** : pemerintah harus memiliki program yang tidak hanya peduli terhadap efisiensi tetapi juga keadilan, pendistribusian sumber daya yang adil di masyarakat. Pada competitive equilibrium, terdapat social efficiency maximizing point bukan social welfare maximizing point

✚ **Social welfare function** : mengkombinasikan semua fungsi utility individu menjadi fungsi utility sosial

✚ **Rawlsian social welfare function** : sosial welfare ditentukan oleh minimum utility yang dimiliki masyarakat, kesejahteraan masyarakat dimaksimalkan dengan memaksimalkan kesejahteraan yang terburuk dari orang2 dalam masyarakat.

Pertemuan 2

✚ **Perkembangan keuangan publik sebelum islam**

a. Romawi, yunani dan mesir kuno Administrai keuangannya belum memiliki prinsip2 yang mengarahkan perencanaan keuangan, pendapatan (pajak, keuntungan pertambangan, upeti) dan keputusan belanja negara (untuk melindungi rakyat) berada di tangan penguasa, pajaknya ditagih secara menindas dan penguannya tidak produktif.

b. India

Para ekonom india menyadari masalah keuangan publik (tugas negara, sistem pendapatan, pembelanjaan, utang publik). Pendapatannya dari pajak dan belanja negara harus lebih kecil dari pendapatan karena harus ada dana kelebihan dalam kas negara, kalo gaada melakukan pinjaman.

✚ **Keuangan publik dalam islam**

Pengumpulan zakat dan pendapatan lainnya, belanja negara untuk kesejahteraan masyarakat, sistem fiskal. Institusi keuangan publik islam baitul mal (institusi keuangan yang melakukan tugas administrative dengan mengatur penerimaan dan pembelanjaan negara) dan al hisbah (mengawasi pasar dan mengontrol praktek yang meruak transaksi ekonomi)

✚ **Kebijakan terkait zakat**

a. Abu bakar as siddiq

- Mempertahankan petugas zakat yang ditunjuk nabi Muhammad

- Mendistribusikan zakat ke wilayah kekuasaan islam
- Melawan kemurtadan orang2 yang tidak mau membayar zakat

b. Umar bin khattab

- Meningkatkan metode pengumpulan zakat dengan metode al-ashirin
(petugas khusus pengumpul zakat)
- Meningkatkan efisiensi administrasi zakat

c. Usman bin affan

- Mengumpulkan zakat dari real asset yang didistribusikan langsung oleh pemilik kekayaan
- Menggunakan self assessment system

d. Ali bin abi thalib

- memperbaiki sistem pengumpulan zakat dengan meningkatkan keuntungan dari sector agrikultur

+ Karya awal keuangan publik islam

a. Al kharaj (abu yusuf, yahya bin adam, qudamah bin jafar)

- keuangan tanah kharaj dan pengelolaannya

b. Al amwal (abu Ubaid, humaid bin zanjawaih, al dawudi)

- keuangan negara

c. Al ahkam al sutaniyah (abu hasan al mawardi, abu ya'la al farra)

- ketentuanketentuan pemerintahan seperti hukum dan kerajaan

d. Karya-karya bunga rampai (ibn hamzah, al juwaini, al ghazali)

- tanggung jawab negara terhadap penghapusan kemiskinan dan jaminan sosial, aturan2 dan prosedur administrasi pemerintahan, prinsip2 perpajakan dan efisiensi dana publik.

+ Peran pemerintah

- karakteristik pemerintah menurut islam: bisa dipercaya, memerintah berdasarkan aturan hukum islam, bertanggung jawab, adil, bekerja keras, baik kepada masyarakat.

+ Tugas negara secara umum

1. Eksekutif (surat an nisa ayat 59)

- Memiliki administrasi publik yang efisien dan pejabat yang jujur dn manah.
- Negara bertanggung jawab atas tegaknya keadilan, keamanan, hukum, ketentuan, stabilitas.
- Negara menjalankan peran al hisbah (institusi yang mengawasi pasar dari transaksi yang dilarang oleh islam seperti kanz, ihtikar, riba, gharar, maysir, talaqi ruqban) dan baitul mal (pengelolaan dana).
- Pada zaman umar bin khattab terdapat majlis syura' yang menjalankan tugas eksekutif yang terdiri dari kalangan muhajirin dan anshar.

2. Pertahanan (al hajj ayat 79 dan al baqarah ayat 216)

- Melindungi kedaulatan dan kemerdekaan dengan melakukan perlindungan perbatasan dengan segala persiapan.
- Pendapatan pajak digunakan untuk membayar gaji prajurit

3. Perlindungan sosial

- Negara harus menjamin perlindungan sosial bagi warganya terutama kepada orang yang mengabdikan kepada negara dan agama dengan melakukan pengadaan pensiun, orang yang kurang mampu ataupun manula melalui bantuan santunan.

4. Aktivitas ekonomi (al hadid ayat 25)

individu

- Wajib mencari nafkah dan dilarang untuk meminta-minta

Negara

- Memberikan bantuan keuangan dengan memberikan pinjaman untuk usaha produktif seperti kepada para petani yang bertujuan untuk meningkatkan hasil pertanian dan memperluas tanahnya.

5. Pembangunan ekonomi

- Mempertahankan keuangan yang stabil dan mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi
- Memanfaatkan sumber daya yang bertujuan untuk mendorong tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi

6. Tugas pendistribusian (al hasyr ayat 7)

- Menggunakan anggaran untuk tujuan sosio ekonomi untuk keadilan sosial, kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi
- Memberikan bantuan untuk aktivitas ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya.

✚ Sistem fiskal islam



✚ Teori kebijakan fiskal islam



	Sektor swasta	Sektor sukarela	Sektor publik
Orientasi	Profit	Non profit	Non profit

Alokasi	Produksi barang dan jasa		Menyediakan barang publik
Distribusi	Buat yang mampu bayar	Yang membutuhkan	
Stabilisasi	Aktivitas keuangan yang berbasis sector riil		

Pertemuan 3

✚ Karakteristik KPI

- Berlandaskan al-Quran dan Sunnah
- Berlandaskan prinsip keadilan dan sosial justice
- Tujuan: kemashlahatan publik dengan prioritas masyarakat miskin
- Instrument penerimaan (zakat, fai, khums, ghanimah, kharaj) yang menjalankan redistributive justice
- Sistem administrasi yang sederhana dan fleksibel

✚ **Asymmetric information dalam islam** untuk mengatasi asymmetric information, dalam islam terdapat khyiar pda level mikro. Level makro, peranan al-hisbah yang berfungsi untuk menegakkan keadilan kepada pihak yang mendapatkan ketidaktahuan informasi secara lengkap di dalam perekonomian

✚ **Publik goods dalam islam**

- karena dengan sifatnya yang non excludable dan non rivalry, publik goods membuat penyediaan barang tersebut menjadi under-allocation karena hampir tidak ada pihak swasta yang ingin memproduksinya. Sehingga dalam islam terdapat sector sukarela yang menggunakan istrumen seperti wakaf, infaq (menyediakan sarana pendidikan, ibadah, kegiatan pertahanan). Selain itu islam mendorong pemenuhan publik goods melalui sector swasta melalui insentif amal jariyah.
- Penyediaan infrasturktur publik dilaksanakan oleh baitul mal atau orang2 yang memiliki sumber kekayaan yang memadai.

✚ **Eksternalitas dalam islam**

- Meningkatkan eksternalitas positif dan mengurangi eksternalitas negatif melalui pertimbangan masalah mursalah

✚ Common property resources dalam islam

Pemerintah berperan mengelola barang yang termasuk common property resources (rumput, air, api). Untuk mencegah kerusakan diperlukan adanya regulasi dan mendorong individu untuk tidak bersifat egois dan serakah.

✚ Keadilan sosial dalam islam

Keadilan diciptakan dengan memastikan adanya kesempatan yang setara dibandingkan dengan menyamaratakan pendapatan

tujuannya agar individu memiliki insentif buat merealisasikan potensi yang dimiliki secara maksimal

Peran negara memastikan gaad individ yang kehilangn hak nya buat mencapai kesetaraan kesempatan buat mencapai potensinya dan mencegah adanya ketidakadilan karena penyalahgunaan kekuasaan

✚ Pendapatan dan pengeluaran keuangan publik islam

Khums dan ghanimah harta rampasan perang yang diperoleh melalui peperangan

Fai? harta rampasan perang tanpa peperangan fisik

✚ Prinsip dasar KPI

1. Basisnya yang jelas yang sesuai dengan etika dan sosial islam
2. Fokus kebijakannya adalah kesejahteraan umum
3. Melakukan pendistribusian pendapatan secara adil ke berbagai lapisan masyarakat
4. Sumber utama pembiayaan publik sumbangan sukarela dalam bentuk waqaf
5. Dalam keadaan daruta dibolehkan beban pajak baru dan utang

✚ Relasi KPI dan maqasid syariah

□ Dasar Pembelanjaan publik tercapainya sasaran syariah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena pemerintah telah menetapkan kriteria prioritas dan melalui pembelanjaan publik, secara efektif pemerintah mengalihkan kekayaan ke dalam berbagai kelompok masyarakat dengan menyediakan dan melindungi 5 kebutuhan dasar (maqasid syariah).

Pertemuan 4

✚ Siklus APBN

1. Perencanaan dan penganggaran (KNL, kemenkeu, Bappenas)
2. Penetapan (DPR, kemenkeu)
3. Pelaksanaan (Kementrian Negara dan Lembaga)
4. Pencatatan dan pelaporan (KNL, kemenkeu)
5. Pemeriksaan dan pertanggungjawaban □ sebelumnya diaudit oleh BPK

✚ Asumsi Makro APBN

1. Economic Growth □ untuk melihat bagaimana kapasitas anggaran yang dimiliki untuk spending dengan target dapat menstimulus pertumbuhan ekonomi
2. Inflation rate □ untuk memperkirakan harga dari spending yang dikeluarkan
3. Interest rate □ untuk memperkirakan bunga dari utang
4. Exchange rate □ untuk ekspor impor
5. Oil price □ untuk memperkirakan berapa yang didapat dari SDA dan brapa biaya yang dikeluarkan untuk impor SDA

✚ Kenapa Defisit

1. Tingkat tax avoidance (punya pajak tapi gabayar pajak) dan tax evasion (seharusnya bayar pajaknya tinggi tapi di manipulasi biar bayar pajaknya rendah)
2. Tingkat ketidaksetaraan pendapatan dan kekayaan yang tinggi
3. Demographic pressures usia non produktif lebih banyak yang ditanggung oleh usia produktif
4. Government inefficiency gov spendin yang tidak efisien
5. Tingkat subsidi yang tinggi

✚ Pentingnya government fiscal position

1. Memberikan efek jangka pendek dan jangka panjang pada pemerintahan secara makro
Persoalan stabilisasi dalam jangka pendek
 - a) `pera pemerinah dalam menghadapi naik turnnya siklus bisnis
 - b) Otomatis stabilisasi ketika terjadi fluktuasi pemerintah tidak melakukan intervensi karena pemerintah sudah memiliki kebijakan dan program yang sudah di desain untuk mengiangi saat terjadinya fluktuasi
 - c) Discretionary stabilization
 - pemerintah melakukan intevensi
 - Keuangan public fokus dengan bagaimana dampak government budget deficits pada pertumbuhan ekonomi
 - Intergenerational equity
 - merencanakan masa depan dalam menyusun anggaran

Fiscal desentralisasi

Which public services should be devolved?

- a) Spesifik geografi
- b) Permintaan yang heterogen
- c) Local information important for production
- d) Low economies of scale

Permasalahan pemerintah dalam menyediakan public goods; preference revelation (barangnya sudah disediakan), preference aggregation (barangnya yang diperlukan)

Faktor yang hilang dari market pada public goods adalah shopping (menerima aja sehingga tidak efisien), dan kompetisi

Tiebout theory

- Asumsi : mobilitas sempurna (penyediaan barang public melalui kompetisi atau barang public disesuaikan oleh kebutuhan)
- Jika barang public disediakan di setiap kota berbeda, maka akan timbul persaingan secara alami yang disebabkan oleh hak setiap individu untuk memilih preferensi mereka secara bebas. Jika masyarakat dalam suatu kota tidak menyukai penyediaan barang public di kotanya maka mereka dapat pindah ke kota lain yang menyediakan public goods yang sesuai dengan preferensi mereka tanpa gangguan.

Problem pada tiebout theory

- setiap kota terdiri dari individu yang memiliki preferensi yang sama terhadap barang public yang ada. Tiebout theory membutuhkan pembiayaan yang sama untuk barang public untuk semua penduduknya. Pembiayaannya adalah pajak lump sum jumlah pajak tetap yang dibayarkan oleh individu yang tidak berdasarkan pada pendapatan, konsumsi barang dan jasa, atau kekayaan.

Tidak adanya eksternalitas □ karena barang public hanya memiliki efek di suatu kota maka tidak berdampak ke kota lainnya

Pertemuan 5

✚ Democracy majority voting rules

□ Mekanisme yang digunakan adalah dengan mengumpulkan suara individu ke dalam keputusan sosial dengan suara terbanyak (majority voting). Dan opsi yang menerima suara mayoritas yang dipilih. Parameter kehasilannya adalah secara konsisten menggabungkan preferensi individu ke dalam keputusan sosial.

□ Agar mencapai parameter keberhasilan, mekanisme yang dijalankan harus memenuhi tiga tujuan:

- 1) Dominasi □ satu pilihan harus lebih disukai oleh semua pemilih
- 2) Transitivitas
- 3) Ketergantungan alternative yang tidak relevan □ suatu pilihan harus memenuhi syarat bahwa pilihan tersebut lebih disukai dibanding dengan pilihan yang lain.

✚ **The voting paradox** □ kegagalan pemilih mayoritas untuk menghasilkan preferensi transitivitas bagi masyarakat sehingga tidak ada keputusan yang dihasilkan meskipun sudah dirundingkan karena tergantung dengan urutan pengambilan suara. Dalam metodenya, tidak mengetahui siapa yang sebenarnya yang menang Sehingga berpotensi untuk terjadinya **agenda manipulating** □ proses mengatur urutan suara agar hasil yang diputuskan menguntungkan.

□ **Pelajaran yang dapat diambil dari voting paradox**

□ preferensi demokrasi tidak selalu transitif. Mayoritas voting tidak selalu mencerminkan apa yang diinginkan oleh masyarakat.

✚ **Arrow's Impossibility Theorem** □ tidak ada voting yang dapat mengubah preferensi individu menjadi keputusan agregat yang konsisten tanpa membatasi jenis preferensi yang diasumsikan untuk pemilih dan memaksakan dictator.

Kriteria untuk membuat keputusan:

- 1) Menghasilkan suatu keputusan meskipun perbedaan ranking
- 2) Dapat diranking
- 3) Kebulatan suara (hasil suara harus mempresentasikan keputusan masyarakat) jika mayoritas memilih A, maka A harus mengalahkan pilihan lainnya.
- 4) Harus konsisten
- 5) Merangking dua kebijakan independen dari alternative yang tidak relevan

6) Tidak ada satu pihak yang dominan dalam mengambil keputusan.

tujuan : preferensi sosial tidak boleh mencerminkan preferensi hanya satu individu

Arrow's Impossblity Theorem hasil matematis menunjukkan bahwa di bawah kondisi tertentu, tidak ada skema yang menggabungkan prefrensi individu ke dalam preferensi sosial secara valid.

The median voter Theorem penguasa mayoritas akan memilih hasil yang paling disukai oleh pemilih median

Asumsi median voter model

- 1) Single dimension voting pemilih median akan memilih berdasrakan satu masalah
- 2) Hanya terdapat 2 kandidat
- 3) Tidak ada pengaruh ideology
- 4) Tidak ada selektivitas voting asumsinya semua orang dipengaruhi oleh suara public
- 5) Tanpa uang mengabaikan peran uang sebagai alat pengaruh dalam melakukan pemilihan
- 6) Informasi sempurna

Demokrasi dalam Islam islam peduli terhadap manusia baik itu dia kaya atau miskin. Islam tidak mengenal dictator. **Dalam islam**, pemimpin tidak harus kaya asalkan soleh, berpengetahuan, integritas, adil dan bijaksana.



✚ **Dalam demokrasi barat**, konstitusi dapat diubah sesuai keinginan penguasa

Dalam islam, al-quran dan hadits adalah konstitusi tertinggi dan tidak dapat diubah

Demokrasi di era umar bin khattab

mendirikan majelis syura (terdiri dari kaum muhajirin, anshar, aus dan khazraj (penduduk asli Madinah yang pertama kali masuk islam)) yang bertujuan untuk memfasilitasi dialog terbuka untuk mengatasi permasalahan yang ada di masyarakat.

